

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI  
UMUM, DANA BAGI HASIL, DAN BELANJA MODAL  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
(Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun  
2015-2017)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh:**

**FARA DEA ANDALUSIA**

**B200160355**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI  
UMUM, DANA BAGI HASIL, DAN BELANJA MODAL  
TERHADAP PETUMBUHAN EKONOMI  
(Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun  
2015-2017)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh:**

**FARA DEA ANDALUSIA**

**B 200160355**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



**(Drs. Suyatmin Waskito Adi, M.Si)**

**NIDN: 0605086301**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI  
UMUM, DANA BAGI HASIL, DAN BELANJA MODAL  
TERHADAP PETUMBUHAN EKONOMI  
(Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun  
2015-2017)**

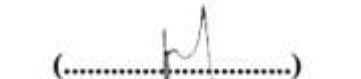
**OLEH  
FARA DEA ANDALUSIA**

**B 200160355**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Jum'at, 16 Oktober 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

- 1. Drs. Suyatmin Waskito Adi, M.Si  
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Dra. Rina Trisnawati. M.Si., Ak., Ph.D.  
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Dra. Nursiam. Ak. M.H.  
(Anggota II Dewan Penguji)**

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

**Dekan,**

  
  
**(Dr. Syamsudin, S.E., M.M.)  
NIDN. 0017025701**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 16 Oktober 2020

Penulis



**FARA DEA ANDALUSIA**

**B 200160355**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,  
DANA BAGI HASIL, DAN BELANJA MODAL TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
(Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Populasi dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten / kota di Jawa Tengah untuk periode 2015-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, laporan realisasi anggaran dan harga konstan PDRB, metode analisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

**Kata Kunci:** pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, belanja modal.

**Abstract**

The study purposes to understand the influence of local revenue, general allocation funds, profit sharing funds, and capital expenditure to economic growth. The population in this study were 35 regencies/cities in Central Java for periods of 2015-2017. The data used in this research is secondary data obtained from the document of Badan Pusat Statistik of Central Java Province, the budget realization report and GDRP at constant prices. The analytical method used multiple linear regression analysis. The results of this research show that local revenue and profit sharing funds significant influenced on economic growth, while general allocation fund and capital expenditure have no significant on economic growth.

**Keyword:** economic growth, local revenue, general allocatin funds, profit sharing funds, capital expenditure.

**1. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal berbentuk pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai potensi yang dimiliki masing-masing daerah tersebut. Diharapkan dengan adanya otonomi daerah dan

desentralisasi fiskal dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing (Laranga, et. al., 2017).

Pembangunan bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari berbagai sektor yang dapat memberikan gambaran bagaimana kemajuan atau kemunduran yang telah dicapai dalam sektor ekonomi pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur menggunakan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dalam tahun atau periode tertentu dan biasanya satu tahun (AR dan Zein, 2016). Jika ditinjau dari sudut pendapatan merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut yang mengikuti proses produksi dalam jangka waktu tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari PAD yaitu untuk memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya (Nisa, 2017). Apabila PAD terjadi peningkatan, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat aktivitas ekonomi daerah akan terjadi peningkatan pula. Meningkatnya aktivitas daerah akan meningkatkan output daerah yang terdiri dari barang dan jasa yang juga diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Diharapkan PAD di suatu daerah dapat terus diperhatikan dengan baik, karena PAD merupakan sumber utama dalam membangun pertumbuhan ekonomi.

Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang

berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan DAU pemerintah daerah dapat menggunakan untuk memberi layanan kepada publik. DAU bersifat black grant yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan layanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Manek dan Badrudin, 2016).

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Setiap daerah memiliki Dana Bagi Hasil yang berbeda sesuai dengan hasil dan realisasi penerimaan dari daerah tersebut.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap (Dewi dan Saputra, 2017). Alokasi belanja modal bertujuan untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah yang memadai. Dalam meningkatkan infrastruktur publik, belanja modal memiliki peran penting yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika suatu daerah memiliki nilai rasio belanja modal yang tinggi maka diharapkan dampaknya terhadap perkembangan perekonomian di daerah tersebut juga tinggi.

Penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor terhadap pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, antara lain Saraswati dan Ramantha (2018), Laranga, et. al., (2017), AR dan Zein (2016), Dewi dan Suputra (2017), Manek dan Badrudin (2016), Mohammad (2016), Waryanto (2017). Peneliti melakukan replikasi yang terinspirasi dari penelitian AR dan Zein (2016), yang melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh, dengan menambahkan variabel Belanja Modal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,

Dana Bagi Hasil, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Empiris Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017)’’.

## **2. METODE**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Maksud dari penelitian kuantitatif sendiri merupakan penelitian yang lebih menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka serta data yang dianalisis dengan menggunakan prosedur statistik.

### **2.2 Populasi, Sampel, Dan Metode Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang ditentukan. Dan diperoleh 34 kabupaten/kota setiap tahunnya sehingga dalam kurun waktu tiga tahun didapat sebanyak 102 kabupaten/kota.

### **2.3 Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk angka mengenai PDRB dan APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017, sumber data dalam penelitian ini dari Badan Pusat Statistik yang diakses melalui website BPS berupa data PDRB, untuk data APBD yang terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Modal diambil dari departemen keuangan yang diakses melalui website [www.djpk.kemenkeu.go.id/](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/)

### **2.4 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dari sumber data yang digunakan yaitu data PDRB dan APBD.

### **2.6 Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$PE = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DBH + \beta_4 BM + \varepsilon \quad (1)$$

Keterangan:

PE : Pertumbuhan Ekonomi

A : Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$  : Koefisien dari tiap variabel

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DBH : Dana Bagi Hasil

BM : Belanja Modal

$\varepsilon$  : *Error*

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Laporan realisasi APBD. Berdasarkan laporan yang dirilis dari [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) didapatkan jumlah kabupaten/kota yang terdaftar di DJPK sebanyak 35 kabupaten/kota. Sehingga dalam penelitian ini terdiri 105 kabupaten/kota selama tahun 2015-2017. Dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel dimana pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu, maka sampel yang diperoleh pada penelitian ini berjumlah 34 kabupaten/kota setiap tahunnya sehingga dalam kurun waktu tiga tahun didapat sebanyak 102 kabupaten/kota.

Tabel 1. Proses Pengambilan Sampel

| Kriteria                                                                                                      | Jumlah |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang menerbitkan laporan PDRB berturut-turut antara tahun 2015-2017.   | 105    |
| Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang tidak menerbitkan LRA secara lengkap dan jelas pada tahun 2015-2017. | (3)    |
| Sampel yang memenuhi kriteria                                                                                 | 102    |
| Data outlier                                                                                                  | (2)    |
| Sampel yang diolah                                                                                            | 100    |

### 3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

| Variabel | N   | Minimum      | Maximum       | Mean            | Std. Deviation   |
|----------|-----|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| PE       | 100 | 0,025367     | 0,069786      | 0,05408642      | 0,005786905      |
| PAD      | 100 | 152044596332 | 1791886378674 | 334371198604,61 | 228501963535,517 |
| DAU      | 100 | 400176755000 | 1398539653000 | 935883524880,00 | 246947851392,765 |
| DBH      | 100 | 18772034465  | 246044588085  | 4903155060,57   | 39708166705,924  |
| BM       | 100 | 51980727019  | 1275359088966 | 376139901689,44 | 183264529570,414 |

Berdasarkan analisis statistik di atas, variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi memiliki nilai minimum sebesar 0,025367 dan nilai maksimum sebesar 0,069786. Nilai rata-rata (mean) pada variabel dependen adalah sebesar 0,05408642, berarti rata-rata kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2015-2017 memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 0,05408642.

Pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017 memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar Rp. 334.371.198.604,61 dengan nilai minimum sebesar Rp. 152.044.596.332 yang terdapat pada Kota Pekalongan dan nilai maksimum sebesar Rp. 1.791.886.378.674 yang terdapat pada Kota Semarang.

Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017 memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar Rp. 935.883.524.880 dengan nilai minimum sebesar Rp. 400.176.755.000 yang terdapat pada Kota Salatiga dan nilai maksimum sebesar Rp. 1.398.539.653.000 yang terdapat pada Kabupaten Banyumas.

Dana Bagi Hasil (DBH) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017 memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar Rp. 49.031.550.060,57 dengan nilai minimum sebesar Rp. 18.772.034.465 yang terdapat pada Kota Magelang dan nilai maksimum sebesar Rp. 246.044.588.085 yang terdapat pada Kabupaten Kudus.

Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017 memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar Rp. 376.139.901.689 dengan nilai minimum sebesar Rp. 51.980.727.019 yang terdapat pada Kabupaten Rembang dan nilai maksimum sebesar Rp. 1.275.359.088.966 yang terdapat pada Kota Semarang.

### 3.2 Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

| Keterangan            | Unstandardized Residual |
|-----------------------|-------------------------|
| Kolmogorov-Smirnov Z  | 0,973                   |
| Asymp. Sig (2-tailed) | 0,300                   |

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas didapatkan bahwa Asymp. Sig. menunjukkan hasil sebesar 0,300 atau 30% hal ini menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal, karena nilainya lebih dari 0,05 atau 5%.

### 3.3 Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

| Variabel   | Collinearity Statistics |       | Keterangan                      |
|------------|-------------------------|-------|---------------------------------|
|            | Tolerance               | VIF   |                                 |
| (Constant) |                         |       |                                 |
| PAD        | ,448                    | 2,230 | Tidak Terjadi Multikolinearitas |
| DAU        | ,642                    | 1,558 | Tidak Terjadi Multikolinearitas |
| DBH        | ,616                    | 1,624 | Tidak Terjadi Multikolinearitas |
| BM         | ,300                    | 3,329 | Tidak Terjadi Multikolinearitas |

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat satu variabel independen yang memiliki nilai VIF yang lebih besar dari 10 dan nilai tolerance yang memiliki nilai  $> 0,10$ . Hal ini berarti bahwa model regresi terbebas dari adanya korelasi yang tinggi antara variabel independen sehingga didapatkan kesimpulan yaitu model terbebas dari multikolinearitas.

### 3.4 Uji Heterokedastisitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

| Variabel | Sig.  | Keterangan                       |
|----------|-------|----------------------------------|
| PAD      | 0,927 | Tidak Terjadi Hetroskedastisitas |
| DAU      | 0,920 | Tidak Terjadi Hetroskedastisitas |
| DBH      | 0,290 | Tidak Terjadi Hetroskedastisitas |
| BM       | 0,813 | Tidak Terjadi Hetroskedastisitas |

Berdasarkan pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai di atas 0,05 atau 5%, berarti bahwa model regresi terbebas dari ketidaksamaan variance dari residual satu ke pengamatan yang lain sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari heteroskedastisitas.

### 3.5 Uji Autokorelasi

Tabel 6. Uji Autokorelasi

| Keterangan          | Durbin-Watson | Kesimpulan                 |
|---------------------|---------------|----------------------------|
| Pertumbuhan Ekonomi | 1,707         | Tidak Terjadi Autokorelasi |

Berdasarkan nilai Durbin Watson menunjukkan nilai 1,707 berarti angka DW berada diantara -2 sampai +2. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan model regresi dalam penelitian ini bebas dari permasalahan autokorelasi.

### 3.6 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh yang dihasilkan dari variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Modal terhadap variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Hipotesis

| Variabel                | Coefficients | T                  | Sig.  | Keterangan       |
|-------------------------|--------------|--------------------|-------|------------------|
| (Constant)              | 0,052        | 31,699             | 0,000 |                  |
| PAD                     | 1,730        | 6,533              | 0,000 | Signifikan       |
| DAU                     | 2,557        | 1,248              | 0,215 | Tidak Signifikan |
| DBH                     | -1,049       | -8,063             | 0,000 | Signifikan       |
| BM                      | -2,011       | -0,498             | 0,619 | Tidak Signifikan |
| F Hitung                |              | 27,232             |       |                  |
| R <sup>2</sup>          |              | 0,534              |       |                  |
| Adjusted R <sup>2</sup> |              | 0,515              |       |                  |
| Sig.                    |              | 0,000 <sup>b</sup> |       |                  |

Hasil pengujian hipotesis di atas menunjukkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$PE = 0,052 + 1,730PAD + 2,557DAU - 1,049DBH - 2,011BM + e \quad (2)$$

#### 3.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan asli daerah memiliki koefisien regresi 1,730 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Angka tersebut berada di bawah tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 0,05. Dengan begitu, maka hipotesis satu yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi diterima.

Dalam hal ini, jika semakin tinggi PAD yang diterima suatu daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah dapat dijadikan sebagai indikator dalam mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PAD yang tinggi dapat mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah dan kemampuan daerah dalam mengelola potensi daerah tersebut. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat pula. Tingginya pendapatan asli daerah menunjukkan pemerintah daerah tersebut mengelola pendapatannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah yang dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat sehingga berdampak pada baiknya kegiatan ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Azis (2016), AR dan Zein (2016), dan Saraswati dan Ramantha (2018) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### 3.6.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana alokasi umum memiliki koefisiensi regresi 2,557 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,215. Angka tersebut berada di atas tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05. Dengan begitu, maka hipotesis dua yang menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kondisi ini kemungkinan disebabkan karena dana alokasi umum yang diterima daerah tidak digunakan untuk kegiatan yang bertujuan pemerataan

pertumbuhan ekonomi antar daerah. Dalam hal ini kemungkinan dana alokasi umum dialokasikan untuk belanja rutin yang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga alokasi tersebut tidak tepat sasaran. Seharusnya dana alokasi umum yang diterima oleh daerah dialokasikan untuk belanja pembangunan sebagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Suputra (2017), dan Putri (2015) yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

### 3.6.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana bagi hasil memiliki koefisien regresi sebesar -1,049 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, nilai tersebut berada dibawah tingkat signifikansi yang digunakan dalam peneliian ini yaitu 0,05. Dengan demikian maka hipotesis tiga yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi diterima.

Ini berarti bahwa terdapat kenaikan pada variabel dana bagi hasil, maka variabel pertumbuhan ekonomi akan menurun. Dalam hal ini disebabkan karena realisasi dana bagi hasil yang diterima secara keseluruhan kurang berkontribusi untuk pembangunan daerah dan belum bisa menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan antar daerah sehingga mengurangi laju pertumbuhan ekonomi. Jika ada penggunaan dana bagi hasil untuk peningkatan daerah itu hanya sebagian kecil. Tujuan dari dana bagi hasil sendiri adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah ([djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id)) dengan kata lain, dana bagi hasil yang didistribusikan kepada daerah ditujukan tidak lain adalah supaya tidak terjadi kesenjangan pendapatan di masing-masing daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati dan Wiksuana (2018) menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpenaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### 3.6.4 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja modal memiliki koefisien regresi sebesar -2,011 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,619. Angka tersebut berada di atas tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 0,05. Hal ini berarti bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, maka hipotesis empat yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ditolak.

Hal ini kemungkinan disebabkan oleh belanja modal tidak digunakan untuk membiayai belanja infrastruktur publik yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun, belanja modal lebih digunakan untuk belanja aparatur yang manfaatnya tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan belanja untuk pembangunan infrastruktur publik sehingga produktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Suputra (2017), menyebutkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

## 4. PENUTUP

### 4.1 Simpulan

- a. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih rendah dari 0,05, sehingga H1 dalam penelitian ini diterima.
- b. Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,215 lebih tinggi dari 0,05, sehingga H2 dalam penelitian ini ditolak.
- c. Dana bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih rendah dari 0,05, sehingga H3 dalam penelitian ini diterima.

- d. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,619 lebih tinggi dari 0,05, sehingga H4 dalam penelitian ini ditolak.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan tersebut, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, yaitu bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambah populasi penelitian, misalnya se-Pulau Jawa atau dapat menggunakan seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Periode waktu pada penelitian selanjutnya sebaiknya lebih diperpanjang untuk dapat mengetahui kecenderungan dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah lebih banyak variabel untuk penelitian selanjutnya agar mampu mewakili lebih banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- AR, Rahmah., dan Zein, Basri. (2016). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Vol. 1, No 1. Hal: 213-220.
- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Unit Percetakan dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- Aziz, Mohammad. (2016). Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Malinau. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*. Vol. 12, No. 1.
- Dewi, Ni Wayan Ratna., dan Suputra, I Dewa Gede Dharma. (2017). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 18, No 3.
- Ghozali, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IMB SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Halim, Abdul., (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematikka Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusumawati, Lily., dan Wiksuana, I Gusti Bagus. (2018). “*Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali*”. *E-Jurnal Manajemen Unud*. Vol. 7, No. 5.
- Laranga, Rosita N. dkk. (2017). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara tahun (2004-2013)”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 17, No. 1.
- Manek, Marianus., dan Badrudin, Rudy. (2016). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur”. *Telaah Bisnis*. Vol. 17, No 2.
- Nisa, Aulia Afafun. (2017). “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 1, Jilid 2. Hal: 203-214.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- Putra, Ida Bagus Dwi., dan Dwirandra, A.A.N.B. (2015). “Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 13, No 3.
- Putri, Zuwesty Eka. (2015). “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 5, No. 2.
- Saraswati, Ida Ayu., dan Ramantha, I Wayan. (2018). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal dan Investasi Swasta sebagai Pemoderasi”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 24, No 1.
- Siregar, Baldric dan Bonni Siregar. (2001). *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Waryanto, Puput. (2017). “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. Indonesian Treasury Review Vol. 2, No. 1, Hal:35-55.